BAB III

PROFIL DEPARTEMEN

3.1 Tinjauan Umum Departemen

Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi atau BPPKI seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 84/KEP/M.KOMINFO/10/2005 Tanggal 26 Oktober 2005 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi*, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(Badan Litbang SDM), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang secara teknis operasional dibina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika, Badan Litbang SDM.

Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan integrasi dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Lembaga Informasi Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara jo Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, status kelembagaan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Landasan Hukum kelembagaan BPPKI adalah sebagai berikut;

- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI
- Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara RI Nomor 15 Tahun 2005;

- Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 84/Kep/M.Kominfo/10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi, yang telah diubah dengan peraturan menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2008

Bila melihat riwayat pendiriannya, BPPKI berasal dari sebuah bentukan lembaga yang bernama Lembaga Penelitian dan Pendapat Umum atau LPPU yang didirikan pada tahun 1975 dan berada dalam lingkup organisasi Departemen Penerangan, dengan penggagas datang dari kalangan pers waktu itu antara lain Harian Umum *Pikiran Rakyat* Bandung. Pada tahun 1977, LPPU berganti nomenklatur menjadi Balai Penelitian dan Pendapat Umum atau BP3U. Tahun 2002 hingga tahun 2008 BP3U berganti nama menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi atau BPPKI. Sejak Tahun 2008 hingga sekarang BPPKI menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI). Sampai saat ini lembaga ini telah dipimpin oleh enam orang kepala balai.

Tabel 3.1 Kepala Balai

No	Nama Pejabat	Jabatan	Periode
1.	Drs. Eyo Kahya	Kepala LPPU	1975 – 1977
2.	Drs. T.U. Pasaribu	Kepala BP3U	1977 – 1997
3.	Drs. H.Marullah	Kepala	1997 –

	Pribady	BP3U	2002
4.	Drs. Maman Darisman	Kepala BP3U	2002 – 2005
5.	Drs. Sumarsono, M.Si	Kepala BPPKI	2005 – 2008
6.	Drs. Ramon, M.Si	Kepala BPPKI	2008 -

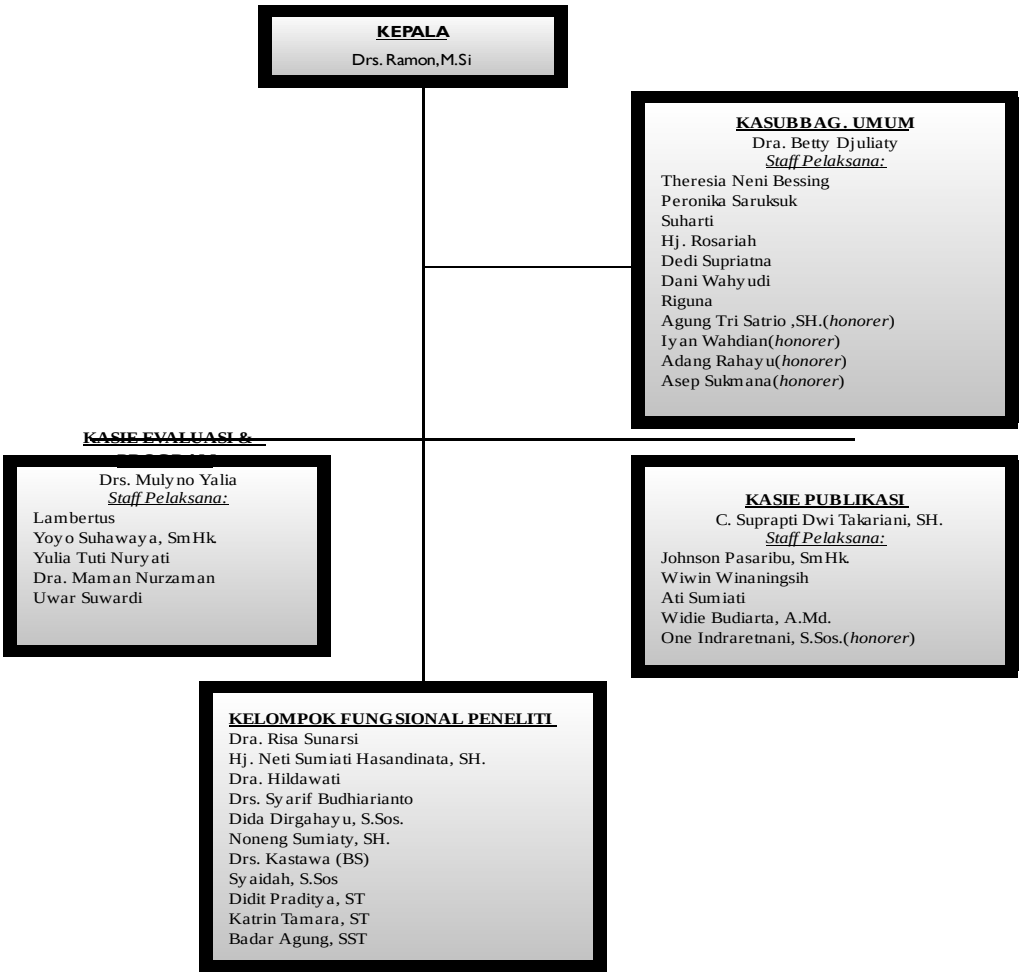
Sumber : BPPKI, 2010

3.2 Struktur Organisasi Departemen

BPPKI dipimpin oleh seorang Kepala, dengan jabatan eselon IIIa. Susunan organisasi BPPKI terdiri dari Kepala Subbagian dan Kepala Seksi setingkat jabatan eselon IVa; yaitu;

- *Subbagian Umum* yang mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta penyusunan laporan;
- *Seksi Program dan Evaluasi* meliputi penyusunan program pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika di daerah serta evaluasi pelaksanaannya;
- *Seksi Publikasi* melaksanakan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika;
- *Kelompok Jabatan Fungsional* yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, di mana setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPPKI.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Sedangkan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah struktur organisasi di BPPKI.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Data Pegawai BPPKI Bandung sampai dengan April 2009, seluruhnya berjumlah 31 orang (tidak termasuk tenaga honorer), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
I	**Jabatan Struktural**	
	Eselon III – a 1 orang	1 orang
	Eselon IV – b 3 orang	1 orang
II	**Jabatan Fungsional**	
	Peneliti	7 orang
	Litkayasa	7 orang
	Pustakawan	-
	Analis Kepegawaian	1 orang
	Kehumasan	-
III	Peneliti Merangkap	
	Struktural	3 orang
IV	Calon Peneliti	4 orang

Sumber : BPPKI, 2010

Tabel 3.3 Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pengatur Muda (II/a)	1
2	Pengatur Muda TK.1(II/b)	-
3	Pengatur (II/c)	2

4	Pengatur (II/d)	1
5	Penata Muda (III/a)	2
6	Penata Muda Tk.1(III/b)	5
7	Penata (III/c)	7
8	Penata Tk.1(III/d)	8
9	Pembina (IV/a)	4
10	Pembina Tk.1 (IV/b)	1

Sumber : BPPKI, 2010

Tabel 3.4 Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	1 orang
3	SLTA	10 orang
4	SARJANA MUDA/D3	4 orang
5	SARJANA (S1)	17 orang
6	MAGIISTER (S2)	1 orang

Sumber : BPPKI, 2010

3.3 Deskripsi Kerja

Kegiatan yang dilakukan BPPKI meliputi pengkajian dan pengembangan informasi. Pengkajian adalah aktivitas yang dilakukan dengan metode ilmiah terhadap objek tertentu sehingga dapat dihasilkan pengertian mendalam tentang objek tersebut. Sedangkan pengembangan adalah aktivitas ilmiah yang

menghasilkan temuan baru dan model aplikatif yang dapat dipergunakan secara pragmatis.

Produk yang dihasilkan BPPKI Bandung tidak saja berupa data yang terdiri dari data dan informasi hasil kajian isu daerah dari media cetak - dilaksanakan setiap minggu atau 52 minggu dalam satu tahun - dan data serta informasi hasil penelitian lapangan, tetapi juga meliputi jasa berupa, layanan data dan informasi melalui perpustakaan, layanan jasa penelitian dan pengumpulan data, dan layanan jasa informasi melalui akses internet.

3.3.1 Visi dan Misi

3.3.1.1 Visi Depkominfo

Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.3.1.2 Visi BPPKI Bandung

Berkembangnya tata informasi masyarakat berbasis telematika yang sehat, lancar, murah, dan bermanfaat melalui fasilitasi layanan informasi dan data *research.*

3.3.1.3 Misi BPPKI Bandung

- Mengembangkan hasil kegiatan pengkajian komunikasi dan informatika untuk terciptanya kualitas masukan (*inputs*) terhadap *user*.
- Meningkatkan pengembangan pengkajian komunikasi dan informatika sebagai daya dukung pembaruan sistem informasi masyarakat.

- Mengembangkan SDM profesional sesuai tuntutan zaman serta mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi kepada *user* secara prima.
- Menyediakan dan menyebarluarkan informasi nasional dan daerah sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban sosial ke masyarakat
- Mewujudkan standar aplikasi pemanfaatan telematika di masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPKI menyelenggarakan fungsi yang meliputi; penyusunan program pengkajian dan pengembangan informasi; pelaksanaan pengkajian dan pengembangan serta publikasi hasil pengkajian dan pengembangan informasi; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan informasi di daerah; serta pelaksanaan administrasi.